

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pelayanan Publik

Konsep mengenai pelayanan banyak dikemukakan oleh para ahli seperti Haksever et al (2000:65) menyatakan bahwa jasa atau pelayanan (*services*) didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk dan kegunaan psikologis. Menurut Edvardsson et al (2005:97) jasa atau pelayanan juga merupakan kegiatan, proses dan interaksi serta merupakan perubahan dalam kondisi orang atau sesuatu dalam kepemilikan pelanggan.

Menurut Sinambela (2010:3) pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Pelayanan adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Sementara itu, istilah publik berasal dari bahasa Inggris yaitu *public* yang berarti umum, masyarakat, negara. Istilah publik sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. Inu dan kawan-kawan (2011:15) mendefinisikan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap atau tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki. Pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Pelayanan publik dapat diartikan, pemberi layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, fungsi teori pelayanan publik adalah untuk mengetahui bagaimana yayasan sebagai organisasi nirlaba mampu menjalani tugasnya untuk melayani publik melaporkan pertanggungjawabannya secara benar. (Indra Bastian,2007:105)

2.1.2 Organisasi Nirlaba

2.1.2.1 Pengertian Organisasi Nirlaba

Organisasi Nirlaba Organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi yayasan, LSM, gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institute, riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah. Organisasi nirlaba memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Sumber daya entitas. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
- b. Menghasilkan barang/jasa tanpa bertujuan menumpuk laba. Menghasilkan barang/jasa tanpa bertujuan menumpuk laba, kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para atau pemilik entitas tersebut.
- c. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada suatu likuidasi atau pembubaran entitas. (Hasana, 2011:25)

Dalam penelitian ini, organisasi nirlaba yang akan di teliti adalah salah satunya yayasan. Studi akan dilakukan pada yayasan pelayan masyarakat yang sudah menggunakan laporan keuangan di kota Bandung.

2.1.2.2 Pengertian Yayasan

Definisi Yayasan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No.16 Tahun 2001 di jelaskan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Dari definisi tersebut di atas ada 4 catatan utama tentang Yayasan, yakni

1. Yayasan merupakan badan hukum, dapat bertindak dan melakukan perbuatan hukum yang sah dan mempunyai akibat hukum walupun nantinya yang bertindak adalah organ yayasan, yakni pembina, pengawas maupun pengurusnya.

2. Mempunyai harta kekayaan yang dipisahkan.

Mempunyai aset, baik bergerak atau tidak bergerak, yang pada awalnya diperoleh dari modal/kekayaan pendiri yang telah dipisahkan.

3. Mempunyai Tujuan Tertentu.

Merupakan pelaksanaan nilai-nilai, baik keagamaan, sosial maupun kemanusiaan dan tidak mencari untung atau nirlaba.

4. Tidak mempunyai anggota.

Tidak mempunyai pemegang saham atau sekutu sekutunya. Namun yayasan digerakan oleh organ yayasan baik Pembina, Pengawas namun yang berperan utama didalam pengorganisasiannya adalah pengurus harian.

Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dijelaskan bahwa harta kekayaan awal diperoleh dari pemisahan harta kekayaan (masukan) dari pendiri Yayasan, baik dalam bentuk uang maupun barang. Pemisahan harta kekayaan pendiri sangatlah penting untuk menghindari agar jangan sampai kekayaan awal yayasan masih merupakan bagian harta pribadi dari pendiri atau harta bersama dari pendiri dan keluarganya. Selain berasal dari pemisahan harta tersebut, harta kekayaan yayasan juga diperoleh dari :

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat
- b. Wakaf
- c. Hibah
- d. Hibah wasiat
- e. Perolehan lainnya.

Syarat minimum harta kekayaan yayasan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Organ Yayasan adalah Pembina, Pengawas, Pengurus. Kewajiban suatu Yayasan adalah membuat laporan tahunan dan upaya melakukan pemeriksaan terhadap yayasan.

Resiko Hukum Bagi Organ Yayasan (Pembina, Pengawas dan Pengurus) :

- a. Tidak digaji
- b. Bisa dipenjara
- c. Harta pribadi pengurus dan pengawas dapat menjadi jaminan.
- d. Keterikatan pengurus pada Anggaran Dasar Yayasan.
- e. Penerapan Prinsip Duty Skill Care bagi pengurus dan Pengawas.
- f. Pelaksanaan kegiatan karyawan.

2.1.2.3 Bentuk dan Karakteristik Organisasi Yayasan

Menurut UU No. 16 Tahun 2001 pasal 1 ayat 1 tentang yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Menurut Indra Bastian (2007:26) karakteristik dan sifat dari yayasan bisa dilihat dari tujuan yayasan, visi, misi, sumber pembiayaan kekayaan, pola pertanggungjawaban, struktur organisasi yayasan, karakteristik anggaran, dan sistem akuntansi. Yayasan mempunyai fungsi sebagai

pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Setiap organisasi termasuk yayasan memiliki tujuan yang spesifik dan unik yang dapat bersifat kuantitatif mencakup pencapaian laba maksimum, penguasaan pangsa pasar, pertumbuhan organisasi, dan produktivitas. Sementara tujuan kualitatif dapat disebutkan sebagai efisiensi dan efektivitas organisasi, manajemen organisasi yang tangguh, koral karyawan yang tinggi, reputasi organisasi stabilitas, pelayanan kepada masyarakat, dan citra perusahaan. Visi dalam yayasan dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan suatu yayasan. Misi suatu yayasan adalah maksud khas (unik) dan mendasar yang membedakan organisasi dari organisasi lainnya dan yang mengidentifikasi ruang lingkup operasi. Perumusan misi harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik. Sumber pembiayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain itu, yayasan juga memperoleh sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, seperti berupa wakaf, hibah, hibah wasiat, perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekayaan yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan. Pengelola (pengurus dan pengawas) bertanggungjawab kepada Pembina yang disampaikan dalam rapat pembina yang diadakan setahun sekali. Pola pertanggungjawaban di yayasan bersifat vertikal dan horizontal.

Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban yayasan kepada pembina. Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban ke masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban sektor publik tersebut merupakan elemen penting dari proses akuntabilitas publik. Pertanggungjawaban manajemen (*managerial accountability*) merupakan bagian terpenting bagi kredibilitas manajemen di yayasan. Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Pasal 2 tentang yayasan mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang tersebut atau anggaran dasar. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan, dan pihak yang dapat diangkat jadi pengurus adalah individu yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Dilihat dari karakteristik anggaran, rencana anggaran yayasan dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan yayasan yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Sistem akuntansi merupakan prinsip akuntansi yang menentukan kapan transaksi keuangan harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Sistem akuntansi yang diterapkan akan berubah sebagaimana halnya dengan sumber daya dan kebutuhan

yayasan. Yayasan berskala kecil yang berdiri hanya perlu mempertahankan akurasi catatan aktivitas dalam buku cek. Jika jumlah transaksi berkembang, yayasan akan menambahkan pembayaran kas secara manual dan jurnal untuk transaksi penerimaan kas dengan menyiapkan laporan bulanan yang berupa ringkasan item pendapatan dan biaya. Pada sebuah yayasan, penekanan diberikan kepada penyediaan biaya data yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual (*accrual accounting*) yaitu akuntansi pendapatan dan biaya. (Indra Bastian, 2007:73)

2.1.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (PSAK 45)

2.1.3.1 Pengertian Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain (1996:1487), penerapan adalah cara atau hasil. Senada dengan hal tersebut Lukman Ali (1995:1044) menyatakan bahwa penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut (Wahab, 1990:45)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 merupakan standar khusus untuk organisasi nirlaba. Karakteristik organisasi nirlaba sangat berbeda dengan organisasi bisnis yang berorientasi untuk memperoleh laba. Perbedaan terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi yang bersangkutan. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis, contohnya penerimaan sumbangan. Pada beberapa bentuk organisasi nirlaba meskipun tidak ada kepemilikan, organisasi tersebut mencukupi modalnya dari hutang dan mendanai kegiatan operasionalnya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya pengukuran jumlah, saat dan kepastian aliran pemasukan kas menjadi ukuran kinerja yang penting bagi para pengguna laporan keuangan organisasi tersebut, seperti kreditur dan pemasok dana lainnya. (SAK per juni 2011)

2.1.3.2 Ruang Lingkup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (PSAK 45)

Pernyataan ini berlaku bagi laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi nirlaba yang memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
- b. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
- c. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkahi, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.

Pernyataan ini tidak berlaku bagi lembaga pemerintah, departemen dan unit-unit sejenis lainnya. Laporan keuangan untuk organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berbeda dengan laporan keuangan untuk organisasi bisnis pada umumnya. Pernyataan ini menetapkan informasi dasar tertentu yang harus disajikan dalam laporan keuangan organisasi nirlaba. Hal-hal yang tidak diatur dalam pernyataan standar akuntansi ini harus mengacu kepada pernyataan standar akuntansi yang berlaku umum.

2.1.3.3 Sifat Pembatasan Dana dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45)

Menurut PSAK Nomor 45 Laporan keuangan untuk organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan memperhatikan sifat pembatasan dana, menurut PSAK 45 mendefinisikan sebagai berikut:

- a. Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.
- b. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.
- c. Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.
- d. Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. (IAI, 2010:45.3)

2.1.3.4 Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan dan disiapkan oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak internal dan eksternal, yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari satu kesatuan usaha yang merupakan salah satu alat pertanggung jawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak- pihak yang membutuhkannya. (Wiwin Yadiati, 2007:51)

Penyajian laporan keuangan adalah tindakan penting dalam pelaporan keuangan. Penyajian laporan keuangan ini mengakui dan mengukur transaksi, kejadian, dan saldo serta selanjutnya melaporkannya sesuai dengan aturan kepada pengguna. Penyajian laporan keuangan untuk memudahkan analisis dan perbandingan dalam laporan keuangan, seperti yang di tunjukkan oleh BASF SE adalah sesuai dengan yang dikemukakan IFRS, yaitu agar dapat dibandingkan (komparabilitas). Berdasarkan hal tersebut untuk mencapai tujuan dari laporan keuangan dan mematuhi karakteristik kualitatif informasi keuangan, IAS 1 mensyaratkan bahwa laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dalam laporan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan dan beban. (Nelson Lam dan Peter Lau, 2014:198)

Karakteristik Penyajian Laporan Keuangan, satu set laporan keuangan dapat di anggap menjadi penyajian yang wajar posisi keuangan entitas, kinerja keuangan, dan arus kas ketika entitas mempersiapkan laporan keuangan sesuai

dengan IFRS dengan pengungkapan tambahan bila diperlukan. Dalam karakteristik penyajian laporan keuangan harus meliputi hal sebagai berikut :

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva bersih, serta mengetahui hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Laporan posisi keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aktiva dan kewajiban. Laporan posisi keuangan mencakup organisasi secara keseluruhan dan harus menyajikan total aktiva, kewajiban dan aktiva bersih. Informasi tersebut umumnya disajikan dalam pengumpulan aktiva dan kewajiban yang memiliki aktivitas serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen.

2. Laporan aktivitas

Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer dan tidak terikat dalam suatu periode. Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai :

- a. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih,
- b. Hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan
- c. Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang dan menyajikan

beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat. Sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, tidak permanen, atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasannya. Dalam hal sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sebatas disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain atau kewajiban sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi. Klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian dalam kelompok aktiva bersih tidak menutup peluang adanya klasifikasi tambahan dalam laporan aktivitas. Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung.

3. Laporan arus kas untuk satu periode laporan

Tujuan umum laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan ini digunakan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menggunakan arus tersebut. Penilaian atas kemampuan menghasilkan kas dikaitkan dengan aktivitas yang dijalankan perusahaan, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

4. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan, merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan-laporan di atas. Catatan atas laporan keuangan dapat berupa :

- a. Perincian dari suatu perkiraan yang disajikan, misalnya aktiva tetap

- b. Kebijakan akuntansi yang dilakukan, misalnya metode penyusutan serta tarif yang digunakan untuk aktiva tetap lembaga, metode pencatatan piutang yang tidak dapat ditagih serta presentase yang digunakan untuk pencadangannya (Pontoh, 2013:46)

2.1.3.5 Pengukuran Laporan Keuangan

Menurut Masidjo (1995:14) pengukuran adalah suatu kegiatan menentukan kuantitas suatu objek melalui aturan-aturan tertentu sehingga kuantitas yang diperoleh benar-benar mewakili sifat dari suatu objek yang dimaksud. Dasar pengukuran yang digunakan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan biaya historis, dan digabungkan dengan dasar pengukuran yang lain. Adapun berbagai dasar yang biasanya digunakan dalam pengukuran adalah sebagai berikut :

1. Biaya Historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban (*obligation*) atau dalam keadaan tertentu (misal pajak penghasilan) dalam jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal

2. Biaya Kini (*Current Cost*)

Aset dinilai dalam jumlah kas atau setara kas seharusnya bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam

jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan (*undiscounted*) yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*) sekarang.

3. Nilai Realisasi/Penyelesaian (*Realizable/Settlement Value*)

Aset dinyatakan dalam jumlah kas (setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal (*orderly disposal*). Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian yaitu jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.

4. Nilai Sekarang (*Present Value*)

Aset dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Kewajiban dinyatakan sebesar arus kas keluar bersih masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Dasar pengukuran yang lazimnya digunakan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan dasar pengukuran lain untuk pos pos tertentu seperti untuk persediaan, selain biaya historis bisa menggunakan metode *lower of cost or net realizable value*.

2.1.3.6 Pengungkapan Laporan Keuangan

Pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan keuangan merupakan penyajian informasi yang diperlukan untuk berlangsungnya Pasar Modal yang efisien secara optimum. Banyaknya informasi yang diungkap tidak hanya tergantung pada keahlian pembaca tetapi juga standar yang dianggap cukup. Dasar perlunya praktek pengungkapan laporan keuangan oleh manajemen kepada pemegang saham dijelaskan dalam *agency theory*. Menurut Jensen dan Meckling (1976 dalam Simanjuntak dan Widiastuti 2004), *agency relationship* (hubungan keagenan) ada bilamana satu atau lebih individu yang disebut dengan *principal* bekerja dengan individu atau organisasi lain yang disebut *agent*, *principal* akan menyediakan fasilitas dan mendelegasikan kebijakan pembuatan keputusan kepada agen.

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (*Mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*Voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan. *Disclosure* dalam laporan tahunan merupakan sumber informasi untuk pengambilan keputusan investasi. Keputusan investasi sangat tergantung dari mutu dan luas pengungkapan yang disajikan dalam laporan tahunan. Mutu dan luas pengungkapan laporan tahunan masing-masing berbeda. Perbedaan ini terjadi karena karakteristik dan filosofi manajemen masing-masing perusahaan

juga berbeda. Selain digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan *disclosure* dalam laporan tahunan juga digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Verdiyana, 2006). Luas Pengungkapan (Na'im dan Rakhman 2000) menyatakan kualitas tampak sebagai atribut yang penting dari suatu informasi akuntansi. Kualitas akuntansi masih memiliki makna ganda (*ambiguous*) banyak penelitian yang menggunakan *indeks of disclosure methodology* mengemukakan bahwa kualitas pengungkapan dapat diukur dan digunakan untuk menilai manfaat potensial dari sisi laporan tahunan, dengan kata lain Imhoff mengatakan bahwa tingginya kualitas informasi akuntansi sangat berkaitan dengan tingkat kelengkapan.

Na'im dan Rakhman (2000) mengemukakan ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu:

1. Pengungkapan Wajib (*mandatory disclosure*) merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Perusahaan memperoleh manfaat dari menyembunyikan, sementara yang lain dengan mengungkapkan informasi. Jika perusahaan tidak bersedia mengungkapkan informasi secara sukarela, pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan untuk mengungkapkan.
2. Pengungkapan Sukarela (*voluntary disclosure*). Merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Healy dan Palepu (1993) mengemukakan meskipun perusahaan publik diwajibkan untuk memenuhi pengungkapan minimum, mereka berbeda secara substansial dalam hal jumlah tambahan

informasi yang diungkap ke Pasar Modal. Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas dan membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen.

Ada tiga konsep pengungkapan yang umum diusulkan yaitu

a. *Adequate Disclosure* (pengungkapan cukup)

Konsep yang sering digunakan adalah pengungkapan yang cukup yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dimana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.

b. *Fair Disclosure* (pengungkapan wajar)

Pengungkapan tidak wajar secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.

c. *Full Disclosure* (pengungkapan penuh)

Pengungkapan penuh menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang digunakan secara relevan. Pengungkapan penuh memiliki kesan penyajian informasi secara melimpah sehingga beberapa pihak menganggapnya tidak baik kurang pentingnya informasi tersebut. (Hendriksen.2002)

Beberapa metode yang lazim digunakan adalah :

1. Bentuk dan cara pengaturan ikhtisar-ikhtisar keuangan
2. Istilah-istilah yang digunakan adalah penyajian secara terperinci

3. Info yang disajikan dalam ikhtisar keuangan yang bersangkutan dalam bentuk tanda kurung (*parenthetical information*)
4. Catatan kaki (*foot notes*) atas ikhtisar dan perincian atau daftartambahan
5. *supplementary statement* (informasi tambahan yang disajikan dalam
6. bentuk yang agak berbeda diikhtisar keuangan dasar, misalnya namadan ikhtisar laba rugi dengan indeks harga konsumen.

2.1.3.7 Unsur-Unsur Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (PSAK 45)

Laporan keuangan organisasi nirlaba menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 meliputi :

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva bersih, serta mengetahui hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Laporan posisi keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aktiva dan kewajiban. Laporan posisi keuangan mencakup organisasi secara keseluruhan dan harus menyajikan total aktiva, kewajiban dan aktiva bersih. Informasi tersebut umumnya disajikan dalam pengumpulan aktiva dan kewajiban yang memiliki aktivitas serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen.

2. Laporan aktivitas

Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai :

- a. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih,
- b. Hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan
- c. Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang dan menyajikan beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat.

Sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, tidak permanen, atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasannya. Sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sebatas disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain atau kewajiban sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.

Klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian dalam kelompok aktiva bersih tidak menutup peluang adanya klasifikasi tambahan dalam laporan aktivitas. Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan

harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung.

3. Laporan arus kas untuk satu periode laporan

Tujuan umum laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan ini digunakan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menggunakan arus tersebut. Penilaian atas kemampuan menghasilkan kas dikaitkan dengan aktivitas yang dijalankan perusahaan, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

4. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan, merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan-laporan di atas. Catatan atas laporan keuangan dapat berupa :

- a. Perincian dari suatu perkiraan yang disajikan, misalnya aktiva tetap
- b. Kebijakan akuntansi yang dilakukan, misalnya metode penyusutan serta tarif yang digunakan untuk aktiva tetap lembaga, metode pencatatan piutang yang tidak dapat ditagih serta presentase yang digunakan untuk pencadangannya (Pontoh, 2013:46)

2.1.4 Pengendalian *Intern*

2.1.4.1 Pengertian Pengendalian *Intern*

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) (2013:3) pengertian pengendalian internal adalah sebagai berikut :

“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting and compliance.”

Memperhatikan pengertian pengendalian internal menurut COSO tersebut, dapat dipahami bahwa pengendalian *intern* adalah proses, karena hal tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen dasar. Pengendalian *intern* hanya dapat menyediakan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak. Hal ini menegaskan bahwa sebaik apapun pengendalian internal itu dirancang dan dioperasikan, hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai, tidak dapat sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pengendalian internal meskipun telah dirancang dan disusun sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (Seksi 319.2009), di mana dinyatakan pengertian pengendalian internal sebagai berikut :

“Pengendalian Intern adalah sebuah proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi dan, (c) ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi berbagai aktivitas yang mendorong efisiensi kinerja agar tujuan perusahaan dapat tercapai sesuai dengan rencana.

2.1.4.2 Tujuan Pengendalian *Intern*

COSO (2013:3) dalam *framework* terbarunya menyatakan mengenai tujuan-tujuan pengendalian *intern* sebagai berikut :

“The Framework provides for three categories of objectives, which allow organizations to focus on differing aspects of internacontrol :

- 1. Operations Objectives—These pertain to effectiveness and efficiency of the entity’s operations, including operational and financial performance goals, and safeguarding assets against loss.*
- 2. Reporting Objectives—These pertain to internal and external financial and non-financial reporting and may encompass reliability, timeliness, transparency, or other terms as set forth by regulators, recognized standard setters, or the entity’s policies.*
- 3. Compliance Objectives—These pertain to adherence to laws and regulations to which the entity is subject.”*

Berdasarkan konsep COSO, bahwa pengendalian *intern* ditujukan untuk mencapai tiga kategori tujuan yang memungkinkan organisasi untuk fokus pada aspek pengendalian *intern* yang berbeda, yang mencakup tujuan-tujuan operasi, tujuan-tujuan pelaporan, dan tujuan-tujuan ketaatan. Tujuan-tujuan operasi berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi entitas, termasuk tujuan kinerja operasional dan keuangan, dan untuk menjaga aset dari kerugian. Tujuan-tujuan pelaporan berkaitan dengan kepentingan pelaporan keuangan baik untuk kalangan internal maupun eksternal yang memenuhi kriteria andal, tepat waktu, transparan dan persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemerintah, pembuat-pembuat standar yang diakui, ataupun kebijakan-kebijakan entitas. Sementara itu, tujuan-tujuan ketaatan berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dengan mana entitas merupakan subjeknya. Tujuan-tujuan pengendalian *intern* dalam versi ICIF COSO tahun

2013 ini pada dasarnya relatif sama dengan yang dikemukakan pada tahun 1992, namun tujuan-tujuan tersebut mengalami perluasan, misalnya pada tujuan-tujuan operasi yang tidak hanya mencakup kinerja keuangan dan pengamanan aset saja, tetapi juga operasi perusahaan/entitas secara keseluruhan dan sebagai perbandingan, tujuan-tujuan pengendalian *intern* yang dirumuskan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (2009:319.2) dalam buku “Standar Profesional Akuntan Publik” adalah sebagai berikut :

1. Keandalan Pelaporan Keuangan
2. Efektivitas dan efisiensi operasi
3. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

Begitupun Tunggal (2005:254) menyatakan hal yang sama mengenai tujuan pengendalian internal yaitu sebagai berikut :

“Efektivitas dan efisiensi operasi, Keandalan pelaporan keuangan, Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

Beberapa pendapat di atas menjelaskan bahwa tujuan pengendalian *intern* yaitu mencakup 3 (tiga) hal pokok yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan-tujuan operasi yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, bahwa pengendalian *intern* dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari semua operasi perusahaan sehingga dapat mengendalikan biaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Tujuan-tujuan pelaporan, bahwa pengendalian *intern* dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan data serta catatan-catatan akuntansi

dalam bentuk laporan keuangan dan laporan manajemen sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan tersebut dan dapat diuji kebenarannya.

3. Tujuan-tujuan ketaatanterhadap hukum dan peraturan yang berlaku, bahwa pengendalian *intern* dimaksudkan untuk meningkatkan ketaatanentitasterhadap hukum-hukum dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, pembuat aturan terkait, maupun kebijakan-kebijakan entitas itu sendiri.

2.1.4.3 Unsur- unsur Pengendalian *Intern*

COSO (2013:4) menyatakan mengenai unsur-unsur pengendalian *intern* sebagai berikut :

“*Intern control consists of five integrated components :*

1. *Control Environment* (Pengendalian Lingkungan)
2. *Risk Assessment* (Penaksiran Risiko)
3. *Control Activities* (Aktivitas Pengendalian)
4. *Information and Communication* (Informasi dan Komunikasi)
5. *Monitoring Activities* (Aktivitas Pemantauan)

Adapun penjelasan indikator dari pengendalian *intern* sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

Menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi tentang pengendalian.

Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen pengendalian *intern* yang membentuk disiplin dan struktur. COSO (2013:4-6) menjelaskan bahwa lingkungan pengendalian didefinisikan

sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian *intern* diseluruh organisasi.

Lingkungan pengendalian terdiri dari :

- a. Integritas dan nilai etika organisasi;
- b. Parameter-parameter pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dalam mengelola organisasinya;
- c. Struktur organisasi, tugas, wewenang dan tanggung jawab;
- d. Proses untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten; dan
- e. Ketegasan mengenai tolok ukur kinerja, insentif, dan penghargaan untuk mendorong akuntabilitas kinerja.

Lingkungan pengendalian yang dihasilkan memiliki dampak yang luas pada sistem secara keseluruhan pengendalian internal.

2. Penilaian risiko

COSO (2013:4) menjelaskan mengenai komponen penilaian risiko (risk assessment) bahwa penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas, dan risiko terhadap pencapaian seluruh tujuan dari entitas ini dianggap relatif terhadap toleransi risiko yang ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian risiko membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola oleh organisasi. Jusuf (2003:263) menyatakan bahwa penilaian risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi analisis dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

Menggolongkan lima kategori pernyataan yang luas berkaitan dengan penilaian risiko sebagai berikut :

- “1. Keberadaan atau keterjadian, merupakan asersi yang berkaitan dengan apakah aktiva, kewajiban dan ekuitas yang tercantum dalam neraca benar-benar ada pada tanggal neraca serta apakah pendapatan dan beban yang tercantum dalam laporan rugi laba benar-benar terjadi selama periode akuntansi.
2. Kelengkapan, yang menyatakan bahwa semua transaksi dan akun, yang selayaknya ada dalam laporan keuangan semuanya memang dimasukkan.
3. Hak dan kewajiban, merupakan asersi manajemen yang berhubungan dengan apakah aktiva memang menjadi hak perusahaan dan hutang menjadi kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu.
4. Penilaian dan alokasi, merupakan asersi yang menyangkut apakah aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan atau beban telah dimasukkan ke dalam laporan keuangan dengan angka-angka yang benar.
5. Penyajian dan pengungkapan, merupakan asersi yang menyangkut apakah komponen-komponen dalam laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dengan sepantasnya.”

3. Aktifitas pengendalian

Aktifitas pengendalian yang terkait dengan pelaporan keuangan antara lain meliputi :

- a. Desain dokumen yang baik dan bernomor urut tercetak
- b. Pemisahan tugas
- c. Otoritas yang memadai atas setiap transaksi bisnis yang terjadi
- d. Mengamankan harta dan catatan perusahaan
- e. Menciptakan adanya pengecekan independen atas pekerjaan karyawan lain
- f. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi akuntansi terdiri atas berbagai record dan metode yang digunakan untuk memulai, mengidentifikasi, menganalisis,

mengklasifikasi, serta mencatat berbagai transaksi perusahaan dan untuk menghitung aktiva serta kewajiban yang terkait. Kualitas dari informasi yang dihasilkan oleh SIA berdampak pada kemampuan pihak manajemen untuk melakukan tindakan dan mengambil keputusan sehubungan dengan operasi perusahaan serta untuk membuat laporan keuangan yang andal. Informasi akuntansi harus bisa menghasilkan laporan keuangan yang andal.

4. Pengawasan Kinerja

Kegiatan utama dalam pengawasan kinerja meliputi:

- a. Supervisi yang efektif
- b. Akuntansi pertanggungjawaban
- c. Pengauditan internal
- d.

2.1.5 Kualitas Informasi Laporan Keuangan

2.1.5.1 Pengertian Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Romney et al, (2006:14), menyatakan bahwa indikasi dari kualitas informasi akuntansi adalah mengurangi ketidak pastian, mendukung keputusan, dan mendorong lebih baik dalam hal perencanaan aktivitas kerja. Pembuatan keputusan oleh manajemen akan menjadi lebih baik apabila semua faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan tersebut dipertimbangkan. Apabila semua faktor sudah dipertimbangkan, maka manajemen mempunyai risiko yang lebih kecil untuk membuat kesalahan dalam pembuatan keputusan. Salah satu faktor penting yang dapat membantu pihak organisasi dalam membuat keputusan yang

tepat adalah dengan memanfaatkan informasi akuntansi yang tersedian disajikan dengan baik. Variabel kualitas informasi akuntansi diperoleh indikator yaitu mengurangi ketidakpastian, mendukung pembuatan keputusan oleh manajemen dan mendorong lebih baik dalam hal perencanaan aktivitas kerja. Romney et al, (2006:15), menyatakan bahwa dalam dunia modern, kualitas informasi yang kuat akan mengarahkan masa depan bisnis. Hal ini karena kualitas informasi yang baik dapat membawa kesuksesan, sementara kualitas informasi yang buruk dapat menyebabkan kegagalan usaha. Penerapan kualitas informasi akuntansi dapat mendukung peningkatan penyusunan strategi yang optimal, dan pengambilan keputusan yang tepat sasaran, yang dapat mewujudkan tujuan organisasi. (Romney et al, 2006:15)

2.1.5.2 Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas informasi dalam laporan keuangan baeguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu :

1. Dapat dipahami
2. Relevan
3. Keandalan
4. Dapat dibandingkan

Adapun penjelasan indikator dari kualitas informasi sebagai berikut :

1. Dapat dipahami

Karakteristik utama kualitas informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dipahami pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas

ekonomi, bisnis, dan akuntansi, serta mempunyai kemauan untuk belajar tentang informasi yang disampaikan. Namun demikian, informasi yang seharusnya diungkapkan dalam laporan keuangan tidak boleh disembunyikan dengan alasan apapun, kecuali berlawanan dengan hukum.

2. Relevan

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas yang relevan apabila informasi tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dalam menilai peristiwa masa lalu dan masa kini, atau memprakirakan masa depan. Peran informasi dalam peramalan (*predictive*) dan penegasan (*comformity*) terkait satu sama lain. Misalnya, informasi mengenai struktur dan besarnya aktiva yang dimiliki dijadikan dasar peramalan kemampuan entitas dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang medefisitkan. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan terhadap prediksi yang lalu, misalnya, bagaimana struktur keuangan perusahaan diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus handal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas yang andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaiannya. Penyajian yang tulus dan jujur (*faithful representation*) seharusnya disajikan secara wajar. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka kegunaan informasi tersebut dapat menyesatkan, misalnya jika belum ada

kepastian tentang keabsahan dan jumlah tuntutan dalam suatu sengketa hukum, entitas tersebut belum bisa mengungkapkan di dalam laporan posisi keuangan.

4. Dapat dibandingkan

Pemakai laporan keuangan harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas antarperiode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antarentitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode entitas yang sama dan untuk entitas yang berbeda.

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif yang dapat diperbandingkan adalah pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan, serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah entitas dari suatu periode ke periode yang lain pada entitas yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas akan membantu pencapaian daya banding. (Indra Bastian, 2007:99)

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam melakukan penelitian ini, akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang penulis baca diantaranya :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| Tahun | Peneliti | Judul | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|-------|--|--|--|---|--|
| 2014 | Norita Citra Yuliarti | Studi Penerapan Psak 45 Yayasan Panti Asuhan Yabappenatim Jember | Yayasan Panti Asuhan Yabappenatim belum memenuhi komponen laporan keuangan menurut PSAK 45, karena keterbatasan dana yang dikelola dan SDM | Fokus pada Penerapan PSAK 45 pada yayasan | Penelitian sebelumnya tidak menjelaskan penyajian dan kualitas informasi laporan keuangan |
| 2013 | Diyani Ade Rizky Dan Yazid Yud Padmono | Analisis Penerapan PSAK No. 45 Pada Yayasan Masjid Al Falah Surabaya | Yayasan telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PSAK No. 45 dimana yayasan menyusun empat laporan. | Penerapan PSAK 45 pada yayasan | Penelitian sebelumnya tidak menjelaskan penyajian dan kualitas informasi laporan keuangan |
| 2012 | Amanda Rendyaswara dan Akie Rusaktiva Rustam, SE., MSA., Ak. | Analisis Pengendalian <i>Intern</i> Pada Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Pada Organisasi Aiesec Indonesia) | Implementasi Pengendalian <i>Intern</i> pada organisasi AIESEC Indonesia belum berjalan efektif, meskipun telah melakukan aktivitas | Persamaan variabel yaitu pengendalian <i>intern</i> | Penelitian sebelumnya tidak menjelaskan penyajian secara lebih rinci dan kualitas informasi laporan keuangan |

| Tahun | Peneliti | Judul | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|-------|------------------|--|--|--|---|
| | | | pengendalian secara keseluruhan. | | |
| 2011 | Ronny Hendrawan | Analisis Penerapan Psak No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum (Studi Kasus Di Rsud Kota Semarang) | Dapat diambil kesimpulan, psak no. 45 dapat diterapkan secara penuh Pada laporan keuangan blu khususnya rumah sakit | Fokus penelitian pada Penerapan PSAK 45 | Penelitian sebelumnya tidak menjelaskan penyajian secara lebih rinci dan kualitas informasi dan studi pada Badan layanan umum sedangkan peneliti studi pada yayasan |
| 2010 | David Hasibuan | Penerapan PSAK 45 Pada Yayasan Mandiri Anak Bangsa Nusantara Dalam Kaitannya Dengan Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan | Laporan keuangan yang dibuat oleh yayasan mandiri anak bangsa belum sesuai dengan laporan keuangan PSAK no 45 dan belum memiliki kualitas informasi pelaporan keuangan | Peneliti menggunakan satu variabel yang sama dengan peneliti sebelumnya yaitu dalam kaitannya dengan kualitas informasi pelaporan keuangan | Peneliti menggunakan dua variabel sedangkan peneliti sebelumnya hanya menggunakan satu variabel |
| 2007 | Ruri Windiastuti | Pengaruh sumber daya manusai dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan | Pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah | Membahas variabel yang sama yaitu pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan | Peneliti sebelumnya studi pada dinas sedangkan peneliti pada yayasan |

| Tahun | Peneliti | Judul | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|-------|----------------------------|--|--|------------------|--|
| | | keuangan pemerintah | | | |
| 2007 | Surtanti dan Deni Prayitno | Analisis PSAK 45 dalam penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba sudi kasus pada rumah sakit | Pencatatan transaksi-transaksi keuangan pada Gereja Utusan Pantekosta Jemaat Kartasura (GUPDI Kartasura) dilakukan dengan metode basis kas (cash basis). | Analisis PSAK 45 | Dalam penelitian sebelumnya tidak di jelaskan tentang kualitas informasi laporan keuangannya |

Sumber : Hasil Pengolahan Penulis (2015)

Berdasarkan tabel posisi penelitian terdahulu di atas, dapat di jelaskan beberapa penelitian yang dilakukan untuk meneliti pengaruh penerapan PSAK 45 dan Pengendalian *Intern* terhadap kualitas informasi laporan keuangan (studi pada yayasan di kota Bandung)

Penelitian terdahulu mengenai penerapan-penerapan PSAK 45 telah dilakukan oleh Diyani Ade Rizky dan Yazid Yud Padmono yang berjudul analisis penerapan PSAK 45 pada Yayasan Masjid Al Falah Surabaya dimana penerapan metode tersebut digunakan sebagai indikator dalam mengetahui penerapan dalam organisasi nirlaba. Ditambah dengan serta penelitian oleh Surtanti dan Deni Prayitno dengan judul analisis PSAK 45 dalam penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba sudi kasus pada rumah sakit.

Selain itu, penelitian terdahulu berjudul Penerapan PSAK 45 Pada Yayasan Mandiri Anak Bangsa Nusantara Dalam Kaitannya Dengan Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan yang di jelaskan oleh Hasibuan, Laporan

keuangan telah disesuaikan dengan laporan keuangan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan pada Organisasi Nirlaba, tampak bahwa terdapat perbedaan-perbedaan mengenai informasi keuangan yang disampaikan dalam setiap laporan. Penelitian yang dilakukan Ruri Windiastuti (2013:106) Pengaruh sumber daya manusia dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan yang disusun berdasarkan PSAK 45 memiliki karakteristik dan kualitas informasi keuangan yang cukup memenuhi dalam memberi penjelasan dan interpretasi bagi pengurus mengenai pelaporan yang dapat membantu penyedia sumber daya dan pengguna lain memahami informasi keuangan yang ada. Selain itu laporan yang disajikan memenuhi kriteria atas kualitas informasi keuangan yang tinggi dimana penerapan prinsip tersebut telah di laksanakan dalam yayasan itu sendiri hal ini dapat dilihat dari adanya data keuangan berupa laporan keuangan dapat disajikan dengan lengkap seperti teori yang diungkap, dengan penyajian laporan keuangan yang bersifat *simple* dan *accountable*. *Simple* dalam arti pembukuan yang dilakukan oleh yayasan tersebut, sederhana dan sesuai dengan penerapan yang seharusnya tidak mengubah prinsip penyusunan laporan keuangan. Dan *accountable* yaitu pembukuan itu dilakukan untuk pertanggung jawaban kepada pihak-pihak terkait dengan adanya penyajian laporan keuangan atas realisasi dana yang sudah masuk ke yayasan tersebut.

Bentuk transparansi dan pertanggung jawaban yayasan di Bandung kepada *stakeholder* yayasan ini tercermin dari laporan keuangan yang disajikan baik melalui data yang diterima oleh peneliti maupun data yang dapat di buka langsung

pada situs resmi, meskipun bentuk penyajian dilaporan keuangan dalam situs resmi beberapa yayasan di Bandung hanya periode tertentu saja.

Dengan tersedianya hasil penelitian ini maka penelitian ini mempunyai acuan kerja guna memperkuat hipotesis yang diajukan. Sesuai dengan yang telah dikemukakan sebelumnya, pembahasan selanjutnya akan diuraikan mengenai kerangka pemikiran dari penelitian ini.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (PSAK 45) Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Akuntansi dibutuhkan oleh yayasan untuk menghasilkan informasi keuangan maupun untuk meningkatkan mutu pada yayasan itu sendiri. Organisasi nirlaba adalah organisasi-organisasi yang tidak bertujuan mencari keuntungan, melainkan untuk usaha-usaha yang bersifat sosial (Sumarni dan Soeprihanto, 1998:64). Peran standar akuntansi keuangan adalah untuk membentuk kesamaan prosedur bagaimana laporan keuangan disusun dan disajikan, dengan adanya organisasi nirlaba ini, maka disusunlah PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45. Di dalam PSAK 45 diatur mengenai bagaimana bentuk format dari laporan keuangan yang terdapat pada yayasan yang berisi mengenai laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Standar ini juga mengatur bagaimana model pencatatannya dan pelaporannya. (Rizky dan Padmono, 2013)

Berdasarkan PSAK 45 laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk satu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan. Walaupun pelaporan akuntansi mengenai entitas nirlaba telah jelas diatur dalam PSAK 45 tetap saja masih banyak organisasi nirlaba di Indonesia yang belum sanggup untuk melaksanakannya. Seperti yang telah disebutkan di atas, keterbatasan sumber daya dan organisasi yang *scope* nya kecil menjadi salah satu faktor yang membuat pelaksanaan PSAK 45 belum banyak diterapkan. Harapannya dengan melakukan penyusunan laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi kepada regulator, donatur dan pertanggungjawaban kepada publik.

2.3.2 Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Informasi keuangan yang akurat, handal dan tepat waktu merupakan suatu hal yang selalu menjadi perhatian khusus dalam perusahaan maupun organisasi. Hal ini dapat mengukur akuntabilitas perusahaan dalam hal transparansi, sehingga merupakan kewajiban manajemen untuk pembuatan dan pemeliharaan sistem pengendalian internal untuk memberikan jaminan yang wajar bagi para pemegang saham bahwa perusahaan dikendalikan dengan baik oleh manajemen. Pentingnya sistem pengendalian *intern* dalam organisasi adalah sebagai alat yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan dan objektif tertentu. Pengendalian *intern* adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur dan tidak terbatas pada metode pengendalian yang dianut oleh bagian akuntansi dan keuangan, tetapi

meliputi pengendalian anggaran, biaya standar, program pelatihan pegawai dan staf pemeriksa intern (Zamzami,2012). Tujuan dari pengendalian *intern* yaitu menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi operasi perusahaan, membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu untuk dipatuhi. Dewasa ini sering kita dengar dan jumpai hal-hal dalam perusahaan/organisasi yang berkaitan dengan transparansi laporan keuangan. Jika berbicara mengenai keuangan dalam perusahaan ataupun organisasi merupakan suatu hal sensitif yang penggunaannya bisa disalahartikan untuk kebutuhan personal karena berkaitan dengan aset likuid perusahaan yang mudah cair dan jika tidak ada sistem pengendalian internal yang memadai akan sangat merugikan perusahaan, namun permasalahan yang terjadi di lapangan adalah tidak semua organisasi paham akan implementasi dari sistem pengendalian *intern* termasuk organisasi yang global dan besar sekalipun. Penelitian oleh Kampo (2013:2) diperoleh hasil bahwa sebagian besar (73%) elemen-elemen pengendalian *intern* sudah dimiliki oleh yayasan, meskipun dalam pelaksanaannya masih harus disempurnakan. Berdasarkan hasil tersebut mengindikasikan pengendalian *intern* yayasan dapat menjamin ketersediaan informasi keuangan yang akurat, andal, dan terutama dalam usaha melindungi asset yayasan secara aman. (Amanda, 2012)

2.3.3 Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi 45 (PSAK 45) dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Penyusunan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45.

Di dalam PSAK No. 45 diatur mengenai bagaimana bentuk format dari laporan keuangan yang terdapat pada yayasan yang berisi mengenai laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Standar ini juga mengatur bagaimana model pencatatannya dan pelaporannya. (Rizky dan Padmono, 2013)

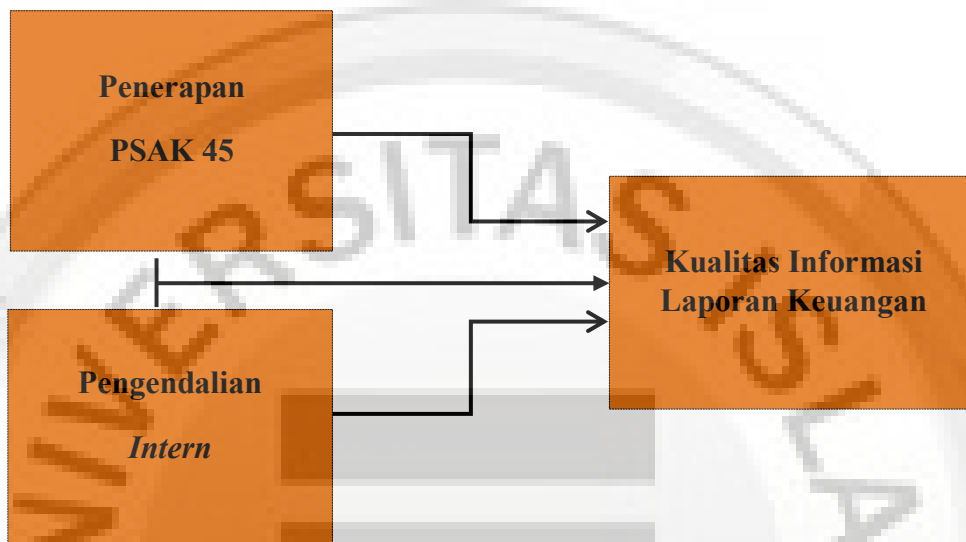
Berdasarkan PSAK 45 laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk satu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan. Walaupun pelaporan akuntansi mengenai entitas nirlaba telah jelas diatur dalam PSAK 45 tetap saja masih banyak organisasi nirlaba di Indonesia yang belum sanggup untuk melaksanakannya. Seperti yang telah disebutkan di atas, keterbatasan sumber daya dan organisasi yang scope nya kecil menjadi salah satu faktor yang membuat pelaksanaan PSAK 45 belum banyak diterapkan. Akuntansi sebagai penggerak (*driver*) berjalannya transaksi bergerak kearah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (*capital suppliers* atau *principals*) mempercayakan (*trust* = amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (*steward* = manajemen) yang lebih

capable dan siap. Pelayanan publik dapat diartikan, pemberi layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, fungsi teori pelayanan publik adalah untuk mengetahui bagaimana yayasan sebagai organisasi nirlaba mampu menjalani tugasnya untuk melayani publik melaporkan pertanggungjawabannya secara benar. (Indra Bastian, 2007:105)

Harapannya dengan melakukan penyusunan laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi kepada regulator, donatur dan pertanggungjawaban kepada publik, sedangkan pentingnya sistem pengendalian *intern* dalam organisasi adalah sebagai alat yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan dan objektif tertentu. . Jika berbicara mengenai keuangan dalam perusahaan ataupun organisasi merupakan suatu hal sensitif yang penggunaannya bisa disalahartikan untuk kebutuhan personal karena berkaitan dengan aset likuid perusahaan yang mudah cair dan jika tidak ada sistem pengendalian *intern* yang memadai akan sangat merugikan perusahaan, namun permasalahan yang terjadi di lapangan adalah tidak semua organisasi paham akan implementasi dari sistem pengendalian *intern* termasuk organisasi yang global dan besar sekalipun. Penelitian oleh Kampo (2013:2) diperoleh hasil bahwa sebagian besar (73%) elemen-elemen pengendalian *intern* sudah dimiliki oleh yayasan, meskipun dalam pelaksanaannya masih harus disempurnakan. Berdasarkan hasil tersebut mengindikasikan sistem pengendalian *intern* yayasan dapat menjamin

ketersediaan informasi keuangan yang akurat, andal, dan terutama dalam usaha melindungi asset yayasan secara aman. (Amanda, 2012)

Kerangka Pemikiran dapat di lihat di gambar 2.1 di bawah ini :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. (Sugiyono, 2010:70)

Berdasarkan tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran, adapun hipotesis diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya pengaruh dari penerapan PSAK 45 terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

2. Adanya pengaruh dari pengendalian intern terhadap Kualitas informasi laporan keuangan
3. Pengaruh Penerapan PSAK 45 dan Pengendalian *Intern* terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

